

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi 2005, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, pengendalian Akuntansi, dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta), STIE Nasional Banjarmasin, Kom[ak, No. 13, Januari – April 2005, Hal 37 – 67.
- Andy Tuty A, 2008, *Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten Tabanan Bali*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Bayu Nur K, 2007, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Propinsi di DIY), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halim, Abdul.2004, *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Intani diah Agustina, 2009. *Pengaruh Sistem Akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pengendalian internal dan Kinerja SKPD* (Studi pada kabupaten temanggung di Provinsi Jawa Tengah).
- Iyhig Wulan, dan Indra Bastian 2005. *Rancangan Sistem Kesejahteraan Sosial ( social security system) di Indonesia dalam Persfektif akuntansi (Studi Empiris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Solo. Simposium Nasional Akuntansi 8, September.
- Mahmudi dan Mardiasmo. 2004. *Local Government Performance Measurement In The Era Of Local Autonomy: The Case of Sleman Regeny Yogyakarta*. SOSIOSAINS. 17 (1). Hal 117 – 133
- Mahsun Mohamad. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Munir Badrul, 2003, *Perencanaan Anggaran Kinerja: Memengkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Cetakan pertama. Smawa Center, Yogyakarta.

Nazaruddin Ietje, 2005, *Modul Praktik Statistik*, UMY, Yogyakarta.

Nur, Nunuy Afiah.2004. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap Prinsip - Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.

Suadi Arif, 1995, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta

Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi Edisi Ketiga*. BPFE. Yogyakarta.

Thoha, Mifta. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi - Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jilid ii. Raja Grafindo persada. Jakarta.

Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh pemahaman Sistem Akuntansi, pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan kerja pemerintah daerah. (Studi pada kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku. Universitas Pattimura Ambon.

Wihandaru., 2004, *Ekonometrika pengantar*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Wulandari Risma Putri, 2009. Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada kabupaten di kota Magelang Jawa tengah, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Negara daerah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 . Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004. Tentang Perpendaharaan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman